

EVALUASI EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGADAAN KEBUTUHAN OBAT PUBLIK SERTA KETERSEDIAAN OBAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO TAHUN 2025

Ayisti Pakinde¹, Saparuddin Latu², Mansur³, Rifa'atul Mahmudah⁴, Andi Muh Yagkin Padjalangi A⁵, Asnah Marzuki⁶

Magister Farmasi, Program Pascasarjana, Universitas Megarezky, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3,4,5},

Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Megarezky, Makassar, Indonesia^{2,6}

Email Korespondensi Author: pakindea@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Dasar, Perencanaan Obat, Pengadaan Obat, Ketersediaan obat

Abstrak

Pengelolaan obat yang baik sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Poso, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pengelolaan obat sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan RI. Namun, perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas sering tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, sehingga diperlukan penelitian dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi metode perencanaan kebutuhan obat yang diterapkan di Puskesmas dan mengidentifikasi permasalahan terkait perencanaan obat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, triangulasi, dan focus group discussion (FGD), serta data sekunder dari Bidang Kefarmasian dan pihak terkait lainnya. Informan utama adalah pelaksana farmasi Puskesmas, dengan triangulasi dilakukan pada Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang Kefarmasian. Data dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perencanaan dan pengadaan obat telah mempertimbangkan beberapa faktor, masih terdapat ketidaksesuaian antara pengadaan dan kebutuhan obat. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pembaruan data yang akurat serta koordinasi yang lemah antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan kabupaten, yang menghambat ketersediaan obat secara optimal. Faktor-faktor lain yang memengaruhi termasuk kebijakan Dinas Kesehatan kabupaten, pembatasan anggaran, pemahaman tentang pengobatan rasional, serta pengawasan terhadap pengadaan dan penggunaan obat. Kesimpulan penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan akurasi data, komunikasi yang lebih baik antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan kabupaten, serta penguatan kebijakan berbasis data akurat dan pengembangan pemahaman pengobatan rasional guna mendukung ketersediaan obat yang optimal dan rasional di Puskesmas Kabupaten Poso.

Keywords:

Puskesmas, Basic Healthcare Services, Drug Planning, Drug Procurement, Drug Availability

Abstrack

Proper drug management is crucial to ensuring the quality of healthcare services. In Poso Regency, the Health Office is responsible for drug management in accordance with the policies of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. However, drug need planning at community health centers (Puskesmas) often does not align with actual requirements, necessitating research and solutions to address this issue. Therefore, it is important to study the process of planning public drug needs and find solutions to this issue. This study aims to evaluate the drug planning methods implemented at the Puskesmas and identify problems related to drug planning. The research type used is qualitative with a case study approach, with primary data collection through in-depth interviews, triangulation, and focus group discussions (FGD), as well as secondary data from the Pharmaceutical Department and other related parties. The main informants are the pharmacy implementers at the Puskesmas, with triangulation conducted with the Head of the Puskesmas and the Head of the Pharmaceutical Department. Data were analyzed using content analysis methods. The research results show that although drug planning and procurement have considered various factors, discrepancies between procurement and drug needs still exist. This is influenced by the lack of updated and accurate data, as well as weak coordination between the Puskesmas and the District Health Office, which hampers optimal drug availability. Other influencing factors include the District Health Office policies, budget limitations, understanding of rational drug

use, and monitoring of drug procurement and usage. The conclusion of this study suggests improving data accuracy, better communication between the Puskesmas and the District Health Office, as well as strengthening policies based on accurate data and enhancing the understanding of rational drug use to support optimal and rational drug availability at the Poso District Puskesmas

Pendahuluan

Ketersediaan obat yang memadai merupakan faktor kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa akses terhadap obat esensial sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kesehatan nasional, termasuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Secara global, lebih dari 50% negara berkembang mengalami kesulitan dalam memastikan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan mereka, yang berdampak pada kualitas layanan dan menyebabkan lebih dari 30 juta kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah atau ditangani dengan obat yang tepat (World Bank, 2022).

Di Indonesia, meskipun telah diterapkan kebijakan Program Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Nasional (PPAK) untuk memperbaiki sistem pengadaan, kendala seperti ketidakakuratan perencanaan kebutuhan, keterlambatan pengadaan, dan distribusi obat yang tidak merata masih sering terjadi. Laporan Kementerian Kesehatan Indonesia (2022) menunjukkan bahwa banyak daerah kesulitan memastikan ketersediaan obat yang dibutuhkan, terutama akibat perencanaan yang kurang tepat dan masalah logistik di lapangan.

Permasalahan serupa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (2022), beberapa fasilitas kesehatan menghadapi kesulitan dalam memastikan ketersediaan obat, yang diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia kompeten dalam perencanaan dan pengelolaan pengadaan obat serta kurangnya data kebutuhan yang akurat. Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Poso (2023) mengungkapkan bahwa hampir 15% Puskesmas di daerah tersebut mengalami kelangkaan obat selama lebih dari dua minggu, sehingga pelayanan kesehatan terganggu. Distribusi obat yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menjadi masalah besar yang perlu segera diatasi.

Faktor eksternal seperti tantangan geografis juga mempengaruhi ketersediaan obat di Kabupaten Poso. Topografi yang bervariasi dan wilayah terisolasi menyulitkan pengiriman obat tepat waktu, terutama ke Puskesmas di daerah sulit dijangkau. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran pengadaan obat dan alat kesehatan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah obat yang diterima dan kebutuhan sebenarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Poso telah melakukan perbaikan sistem pengadaan obat melalui kolaborasi dengan pihak ketiga seperti perusahaan farmasi dan distributor dengan jaringan luas. Pelatihan bagi petugas Puskesmas juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan kebutuhan obat berdasarkan data epidemiologi terkini. Namun, evaluasi lebih mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi pengadaan serta distribusi obat masih diperlukan agar ketersediaan obat memadai di seluruh fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.

Menurut laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso (2023), masalah ketersediaan obat tidak hanya menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga berpotensi memperburuk kesejahteraan masyarakat. Ketidaktersediaan obat penting dapat menurunkan kualitas pengobatan, terutama bagi pasien dengan penyakit menular atau kronis. Oleh karena itu, peningkatan sistem perencanaan, pengadaan, dan distribusi obat menjadi sangat penting agar seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi, dapat mengakses obat yang dibutuhkan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses tersebut di Kabupaten Poso serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan obat di daerah tersebut.

Metode

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan rancangan studi kasus di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, yang bertujuan untuk mengevaluasi proses perencanaan obat, pengadaan obat, serta analisis ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, yang mencakup berbagai puskesmas yang ada di Kabupaten Poso. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi sistem perencanaan, pengadaan, dan distribusi obat di tingkat kabupaten dan puskesmas yang tersebar di wilayah tersebut. Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan dimulai pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Kriteria tersebut diantaranya bersedia untuk diwawancara, memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan obat serta pengalaman mereka dalam manajemen obat di puskesmas atau rumah sakit minimal 1 tahun. Informan Penelitian yang telah dipilih berdasarkan kriteria 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Poso: Kepala Bidang kefarmasian 1 orang, dan petugas terkait yang terlibat dalam perencanaan dan pengadaan obat 2 orang.
- b) Puskesmas yang mewakili daerah berbeda di Kabupaten Poso yang memiliki peran dalam distribusi obat yakni 2 orang kepala puskesmas.
- c) Jumlah Informan: Peneliti akan memilih 6 orang petugas Farmasi puskesmas yang mewakili daerah dengan karakteristik yang berbeda di Kabupaten Poso.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik berikut:

- a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara dilakukan dengan informan kunci, seperti petugas perencanaan obat di Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, apoteker, dan tenaga medis.
- b) Observasi Langsung: Observasi langsung dilakukan di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Poso untuk memantau secara langsung proses distribusi obat dan kesesuaian antara ketersediaan obat dengan kebutuhan di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara.
- c) Studi Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan Dinas Kesehatan, laporan perencanaan obat, anggaran pengadaan obat, serta data penggunaan obat di puskesmas dan rumah sakit. Studi dokumentasi ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai pengelolaan obat yang telah dilakukan

5. Analisis Data

Analisis Data Kualitatif: Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis ini mencakup:

- a) Transkripsi wawancara.
- b) Kategorisasi dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema yang muncul dari wawancara.
- c) Pengidentifikasian pola atau faktor yang mempengaruhi perencanaan, pengadaan, dan distribusi obat.
- d) Penyusunan narasi untuk menggambarkan hasil temuan

Hasil dan Diskusi

Hasil

1. Evaluasi Efektivitas Perencanaan, Pengadaan, dan Ketersediaan Obat

Penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan obat dengan pengadaan yang dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten Poso. Meskipun perencanaan sudah memperhatikan kebutuhan, pengadaan sering terlambat, tidak sesuai jenis atau jumlahnya, dan terjadi masalah rasionalitas pengobatan yang berdampak pada ketersediaan obat di lapangan. Hal ini disebabkan oleh komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), serta data perencanaan yang tidak selalu diperbarui secara akurat. Informan dari Puskesmas dan DKK menegaskan perlunya pembaruan data yang lebih akurat dan penguatan koordinasi agar pengadaan obat dapat berjalan sesuai kebutuhan.

2. Tingkat Ketersediaan Obat

Tingkat ketersediaan obat di Puskesmas menunjukkan tantangan signifikan, terutama untuk obat esensial seperti obat penyakit kronis dan obat sirup anak. Sistem pencatatan stok sudah ada, namun pengadaan yang bergantung pada DKK sering tidak tepat waktu atau tidak mencukupi. Kekurangan stok menyebabkan pasien harus dialihkan ke apotek luar. Kurangnya koordinasi dan data yang tidak terupdate menjadi faktor utama yang memengaruhi ketersediaan obat.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan dan Pengadaan Obat

- Kebijakan DKK: Jenis obat yang digunakan sudah ditentukan oleh DKK, sementara Puskesmas hanya menentukan jumlah berdasarkan kebutuhan lokal.
- Anggaran: Pembatasan anggaran oleh DKK membatasi fleksibilitas Puskesmas dalam memilih dan mengalokasikan obat, sehingga prioritas diberikan pada obat yang dianggap paling dibutuhkan sesuai dana yang tersedia.
- Pemahaman tentang Pengobatan Rasional: Mayoritas informan memahami pentingnya pengobatan yang rasional sesuai standar, meskipun masih ada tantangan seperti duplikasi obat. Pengawasan terhadap durasi dan jenis obat, terutama antibiotik, dilakukan untuk memastikan rasionalitas pengobatan.
- Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan perlu ditingkatkan, terutama untuk mencegah duplikasi obat dan memastikan pemberian obat sesuai standar.
- Ketersediaan Data: Kepercayaan terhadap data yang akurat sangat penting untuk menentukan pengobatan yang tepat. Namun, ada ketidakpastian dan kurangnya keyakinan terhadap keakuratan data yang digunakan.

Pembahasan

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perencanaan, pengadaan, dan ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Poso masih terbatas akibat beberapa kendala utama, yaitu data yang tidak akurat dan tidak terupdate, komunikasi yang lemah antara Puskesmas dan DKK, serta kebijakan dan anggaran yang kurang fleksibel.

- Data dan Komunikasi: Data yang tidak akurat dan komunikasi yang kurang terkoordinasi menyebabkan perencanaan obat tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Ahmad et al. (2020) yang menyatakan bahwa data yang tidak akurat menyebabkan perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan pasien. Suryani et al. (2022) juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala untuk memastikan ketersediaan obat yang sesuai.
- Ketersediaan Obat: Ketidaksesuaian pengadaan dengan kebutuhan nyata di lapangan menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok obat di beberapa Puskesmas. Yusuf et al. (2019) dan Rahman et al. (2021) mengungkapkan bahwa kesalahan prediksi kebutuhan dan sistem pengelolaan data yang tidak terintegrasi menjadi penyebab utama masalah ini. Zahran et al. (2020) menambahkan bahwa kurangnya data real-time memperburuk pengadaan obat di banyak Puskesmas.
- Faktor Kebijakan dan Anggaran: Kebijakan DKK yang menentukan jenis obat tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal dan pembatasan anggaran mempengaruhi efektivitas pengadaan obat. Ismail et al. (2021) menyarankan agar kebijakan pengadaan lebih memperhatikan keunikan wilayah. Jamil & Iqbal (2020) menegaskan bahwa pembatasan anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pengadaan di fasilitas kesehatan dengan dana terbatas.
- Pengobatan Rasional dan Pengawasan: Pemahaman tentang pengobatan rasional sudah cukup baik, namun pengawasan terhadap duplikasi obat dan durasi penggunaan, terutama antibiotik, perlu diperketat. Budianto (2021) dan Kurniawan et al. (2023) menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk menghindari pemborosan dan memastikan pengobatan yang efektif. Nugroho et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pengawasan teratur meningkatkan ketepatan pengadaan obat.
- Pengembangan Sistem dan Pelatihan: Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi data dan komunikasi antara Puskesmas dan DKK, sebagaimana disarankan oleh Rosyid et al. (2023). Pelatihan tenaga medis tentang pengobatan rasional dan pengelolaan anggaran juga penting untuk menghindari pengadaan obat yang tidak efisien (Suryani, 2022).

Kesimpulan

1) Evaluasi efektivitas perencanaan, pengadaan, dan ketersediaan obat di puskesmas Kabupaten Poso menunjukkan bahwa meskipun perencanaan dan pengadaan obat di puskesmas Kabupaten Poso telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, namun masih diperlukan peningkatan dalam akurasi data dan komunikasi antara puskesmas dan DKK agar ketersediaan obat lebih optimal dan rasional. 2) Tingkat ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Poso terganggu oleh ketidaksesuaian antara pengadaan dan kebutuhan, yang dipengaruhi oleh kurangnya pembaruan data yang akurat serta koordinasi yang lemah antara puskesmas dan DKK. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan, dan Pengadaan Obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Poso tahun 2023 meliputi kebijakan DKK dalam menentukan jenis obat, pembatasan anggaran, pemahaman tentang pengobatan rasional, pengawasan dan evaluasi pengobatan, serta ketersediaan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Referensi

- Ahmad, Z., et al. (2020). "Data-driven decisions in health care: Challenges and solutions." *Journal of Health Information Science and Systems*, 8(1), 12-19.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota*. Jakarta, 2001: 7-36.
- Bahfen, Faiq. *Peraturan Dalam Produksi dan Peredaran Obat*. 1st ed. PT. Hecca Mitra Utama. Jakarta, 2006: 56-60.
- Budiono, Santoso. *Penggunaan Obat dan Prinsip Pengobatan Rasional*. Program Pengembangan Eksekutif, Magister Manajemen Rumah Sakit bekerja sama dengan Pusat Studi Farmakologi Klinik dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 1997.
- Depkes RI. *Pedoman Pengelolaan Obat Program Kesehatan*. Ditjen dan Alkes. Jakarta, 2004: 6-28.
- Depkes RI. *Pedoman Pengelolaan Obat Di Puskesmas*. Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Jakarta, 1994: 1-2.
- Depkes RI. *Pengobatan Yang Rasional Di Puskesmas*. Modul Pelatihan Petugas Dokter/Dokter Gigi PTT. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Jakarta, 1996: 3-15.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta, 1990: 626.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. *Rekapitulasi Pemakaian Obat*. Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kota Poso Tahun 2021-2023. Bidang Farmasi Poso, 2023.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. *Indikator Obat Standar*. Instalasi Farmasi, 2023.
- Dinas Kesehatan Kota. *Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Obat*. Farmasi. Tasikmalaya, 2002: 12-29.
- Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. *Kebijakan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan* (Makalah). Sub Dinas Pengawasan. Bandung, Agustus 2006.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). *Laporan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2022*. Palu: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pharmacology and Pharmacy Scientific Journals

- Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nomor: YF. 05.DJ. IV. 199. Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2007. Surat Nomor: YF. 05. DJ. IV. 199.1 tgl 27 February 2007. Jakarta, 2007.
- Jamil, S., & Iqbal, Z. (2020). "Challenges in medicine procurement in public health institutions of Pakistan." BMC Health Services Research, 20(1), 91.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta, 2004: 1-11 and 38-42.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 04 November 2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002. Depkes RI Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta, 2002: vii-xii.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1426/Menkes/SK/XV2002 tanggal 21 November 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Lampiran Jakarta, 220: 1-12.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1412/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD). Lampiran, Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta, 2005: 3-24.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/Menkes/SK/II/1988 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 521/Menkes/SK/IW2007 tanggal 24 April 2007 tentang Harga Obat Generik. Jakarta, 2007.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Pengadaan Obat Nasional. Jakarta: Kemenkes RI. Kristin Etna. Dasar-dasar Perencanaan Kebutuhan Obat. (Makalah Seminar). 3 Agustus 2002. Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, 2002.
- Kurniawan, A., & Prasetyo, D. (2023). "Improving efficiency in pharmaceutical supply chain management: Lessons learned from Indonesia." Journal of Supply Chain Management, 35(2), 124-138.
- Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. 3rd ed. Rineka Cipta. Jakarta, 2005: 30-32 and 79-88.
- Perda Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Poso.
- Rahman, S., et al. (2021). "The role of data management in improving the procurement process in the pharmaceutical sector." International Journal of Health Planning and Management, 36(4), 1535-1547.
- Rosyid, F., et al. (2023). "Improvement of drug procurement process in health centers in rural Indonesia: A study of Puskesmas." Journal of Health Policy and Planning, 38(5), 459-468.
- Sunarsih, I.M. Desentralisasi Asas/Sektor Obat. (Jurnal). Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 05/NO. 02 / 2002: 67-92.
- Thabrany, Hasbullah. Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan Di Indonesia. 4th ed. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005: 167-185.

- Utarini, Adi. Metode Penelitian Kualitatif. Magister Perilaku dan Promosi Kesehatan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2006: 55-70.
- Wasis, Ristrini. Studi Tentang Pembiayaan Kesehatan Oleh Pemerintah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah Di Propinsi Kalimantan Timur. (Jurnal). Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 06 /NO. 02/2003: 97-109.
- World Bank. (2022). The State of Health in the World. World Bank Publications.
- World Health Organization (WHO). (2023). Essential Medicines and Health Products. Retrieved from <https://www.who.int>
- Zahran, T., et al. (2020). "Evaluating the effectiveness of pharmaceutical supply chain management in primary health care services: A case study of Egypt." Journal of Pharmaceutical Health Services Research, 11(3), 215-224.